

## **Pengaruh & Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan**

**Comrie Ihza Mahendra<sup>1</sup>, Nelly Masnila<sup>2</sup>, Yevi Dwitayanti<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Alumni Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

<sup>2,3</sup> Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

\* Corresponding: comriepolsri@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan riset ingin mengidentifikasi dampak penerimaan pajak daerah pada PAD. Jenis riset ini yaitu riset deskriptif. Riset ini dilaksanakan Pada Provinsi Sumatera Selatan dengan data times series tahunan dari tahun 2012 sampai 2021. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Analisis kontribusi dan pengujian regresi linier dipakai pada riset ini. Temuan riset menunjukkan kalau realisasi penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan berdampak positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok tidak berpengaruh signifikan pada PAD. Rata-rata persentase realisasi terhadap target pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan 2012-2021 sebesar 98.19%. Selama periode 2012 hingga 2021, pajak daerah di Sumsel diharapkan memberikan kontribusi rata-rata 5,73 persen per tahun kepada pemerintah daerah. Peningkatan upaya intensifikasi dan jenis serta metode pemungutan pajak baru dapat diperkenalkan berdasarkan keadaan dan kemungkinan daerah yang terdapat guna menumbuhkan keterlibatan pajak daerah pada sumber daya fiskal daerah.

**Kata kunci** : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi

### **Abstract**

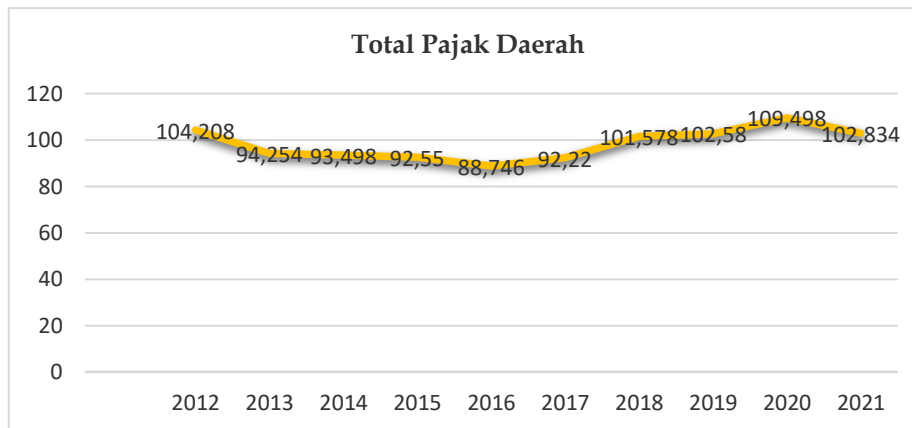
The research objective is to identify the impact of local tax revenues on local revenue. This type of research is descriptive research. This research was conducted in South Sumatra Province with annual times series data from 2012 to 2021. Data collection was done by means of documentation. Contribution analysis and linear regression testing were used in this research. Research findings show that the realization of local tax revenues, namely the Tax on Transfer of Ownership of Motor Vehicles and the Surface Water Tax have a positive and significant impact on PAD. Meanwhile, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Fuel Tax and Cigarette Tax have no significant effect on PAD. The average percentage of realization of the 2012-2021 South Sumatra Province regional tax target is 98.19%. During the period 2012 to 2021, regional taxes in South Sumatra are expected to contribute an average of 5.73 percent per year to local governments. Increased intensification efforts and new types and methods of tax collection can be introduced in accordance with existing regional conditions and potentials to increase the contribution of regional taxes to regional fiscal resources.

**Keywords** : Local Tax, Local Revenue, Contribution

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU/No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sumber PAD itu sendiri sebagian besar bersumber dari pajak daerah. Fokus penelitian ini pada salah satu jenis pajak daerah provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dengan kata lain, Wijaya (2016) dan Pamungkas (2020) menyatakan kalau pajak kendaraan bermotor yang lebih besar berdampak positif pada pendapatan daerah dengan meningkatkan PAD.

Total penerimaan pajak daerah berdasarkan realisasi sepanjang jangka periode 10 tahun terakhir ialah tahun 2012-2021, memperoleh realisasi target tertinggi pada tahun 2020, sedangkan target terendah di tahun 2017. Sehingga rata-rata total pajak daerah realisasi terhadap target untuk 10 Tahun dari tahun 2012 sampai 2021 yaitu 98.2%, seperti dalam tampilan gambar 1 dibawah ini.



**Gambar 1. Persentase Realisasi Target Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Dari berbagai macam pajak yang menjadi sumber PAD, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang berpotensi guna diperoleh di Provinsi Sumatera Selatan, sebab total kendaraan yang terus bertambah sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah Prov Sumsel sudah mengambil usaha untuk mengurangi kemacetan jalan raya, dengan cara menaikkan tarif pajak untuk kendaraan bermotor, tarif pajak progresif, di sisi lain, dirancang untuk menurunkan jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan, bukan hanya jumlah yang terdaftar setiap tahun (Marita & Suardana,2016).

Beberapa penelitian terdahulu oleh Karyadi (2020), Afifah & Nurdiwaty (2020), Halim, Husmaruddin & Januse (2016), Vamiagustina (2014), Anggraini, dkk (2016), Widya (2020) dan Debbyang, Darma, & Purnami, (2018), telah menguji mengenai indikator yang berdampak pada PAD. Penelitian mereka menunjukkan temuan yang berbeda dan tak menampilkan keseragaman hasil. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli

daerah pada provinsis Sumatera Selatan tahun 2012-2021. Riset ini bertujuan guna mendeskripsikan dan menganalisis dampak antara “Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok” pada pendapatan asli daerah. Hasil tersebut memiliki urgensi perlunya sebuah evaluasi yang nantinya bermanfaat bagi pengambil kebijakan khususnya pemerintah daerah untuk adanya peningkatan sumber dan potensi penerimaan PAD dari pajak.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak kendaraan bermotor tahunan yang harus dibayar pengemudi meningkat seiring dengan pertumbuhan total kendaraan bermotor di jalan. Pemerintah daerah mengandalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, dan pendapatan tersebut berdampak langsung pada anggaran mereka. menerima kenaikan PAD. Sesuai dengan riset sebelumnya yang dilakukan oleh Savitri & Anggraeni (2021) kalau ada dampak yang positif antara Pajak Kendaraan Bermotor pada PAD. Sesuai dengan penjelesan tersebut, alhasil bisa dirumuskan hipotesis :

H1: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan

### **Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Perda Sumsel No.3 Tahun 2011, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah biaya keagenan yang dipungut pada saat terjadi kesepakatan dua pihak/sepihak untuk jual beli, pewarisan, penukaran, hibah dan kegiatan usaha yang terlibat dalam pengalihan atau pertukaran kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam studi Apri Mardiansah (2013:90) menyatakan terdapat dampak baik Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas PAD di Banten. Sejalan dengan kasus Rakhmad Rinaldi Wahfar (2014) menerangkan adanya dampak positif signifikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas PAD di Pidie, maka hipotesisnya yakni :

H2: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

### **Pengaruh Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli daerah**

Penerimaan PAP Provinsi Sumsel terjadi pertumbuhan di tahun sebelumnya, bertepatan dengan lajunya pengembangan tempat rekreasi, perhotelan serta sektor usaha air dalam kemasan. Bagi Suhayati (2011) dan Delima, dkk (2022), menerangkan bahwa PAP berpengaruh positif serta signifikan pada PAD. Ketika pajak air permukaan meningkat, maka PAD ikut meningkat tiap periodenya. Maka hipotesisnya yakni:

H3: Pajak Air Permukaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

### **Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli daerah**

Iuran BBNKB yaitu tarif atas pemanfaatan bahan bakar kendaraan bermotor. Dilihat keadaan sekarang harga bahan bakar naik serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar. Berlandaskan penelitian Riama Evi Aprianti (2013) yang mengutarakan adanya dampak positif signifikan atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD di Jawa Barat. Maka diikhtisarkan hipotesis antara lain:

H4: Pajak Bahan Bakar Bermotor berpengaruh positif signifikan pada PAD di Provinsi Sumsel.

### **Pengaruh Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Bea rokok yakni iuran yang dipungut pemerintah daerah berlandaskan kebijakan & peraturan pajak daerah sebagai objek pajak. Jadi, tarif rokok ini menjadi bagian PAD. Menurut Dolu, Natalia Florenca (2018), administrasi dan efektivitas cukai rokok dinilai ideal karena kenaikan cukai dan kenaikan harga rokok. Jadi hipotesis ini adalah:

H5: Pajak Rokok berpengaruh positif signifikan pada PAD di Provinsi Sumsel.

### **Pengaruh Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Studi (Hasrudin,2020) mengungkapkan kenyataannya sumbangan pajak daerah atas PAD yaitu periode 2014 yaitu 15,43%, periode 2015 yaitu 17,83%, periode 2016 yaitu 21,49%, periode 2017 yaitu 21,87%, dan periode 2018 yaitu 23,09%. Setiap tahun, itu berkembang. Dalam jangka waktu tertentu, persentase total pajak daerah terhadap total PAD inilah yang dikenal sebagai kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Pada tingkat yang lebih besar, rasio memberikan kontribusi terhadap PAD semakin besar nilainya. Pajak daerah menjadi sumber pemasukan daerah yang penting dalam menyokong kegiatan dan pembangunan pemerintah daerah. Maka dari itu hipotesisnya:

H6: Kontribusi penerimaan pajak daerah berdampak pada PAD.

## **III. METODE PENELITIAN**

Jenis riset ini adalah penelitian deskriptif. Teknik riset memakai teknik kuantitatif dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Ada 1 variabel terikat ialah “Pendapatan Asli Daerah dan ada 5 variabel independen yang akan diteliti yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok” pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis data yang dipakai ialah data sekunder dengan rentet waktu/time series 10 tahun yaitu tahun 2012-2021. Dengan memakai SPSS

21.0 for Windows dan analisis linier berganda, hipotesis penelitian ini terbukti kebenarannya. Kontribusi realisasi penerimaan dari setiap tipe pajak daerah menampilkan rasio realisasi penerimaan PAD yang mengindikasikan seberapa besar kontribusi tiap tipe pajak daerah. Semakin besar suatu rasio artinya semakin tinggi juga jenjang kontribusi pajak terhadap PAD, dengan pedoman tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
20%-30%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri,2015

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Statistik Deskriptif

Data Realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD dijelaskan dalam tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNPKB	10	449,954,802,932.00	1,069,603,760,039.00	785.953.893.908.6750	245.736.542.909.51382
LNBBN.KB	10	451,954,606,714.50	984,749,660,968.00	695.960.782.867.0480	207.517.874.206.73175
LNPAP	10	10,845,979,912.00	513,205,513,586.00	198.196.342.219.5720	204.373.321.029.60303
LNPBB.KB	10	280,841,939,000.00	939,777,027,499.04	606.949.699.347.6350	243.759.447.781.60610
LNPR	10	316,092,178,944.00	583,684,383,066.00	430.402.127.415.3690	96.695.226.175.40451
LNPAD	10	2,001,714,583,552	3,866,149,015,117	2.882.219.430.695.9000	665.507.843.393.37830

Sumber: Data yang diolah,2022

Sesuai dengan tabel 2 bisa dilihat kalau Realisasi Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi minimum sebesar 2,001,714,583,552 dan kontribusi maksimum adalah sebesar 3,866,149,015,117 dengan rata-rata kontribusi sebesar 2.882.219.430.695.9000%. Kemudian Pada Variabel Independen Kontribusi minimum yang diberikan oleh LNPKB adalah sebesar 449,954,802,932.00 dan kontribusi maksimumnya sebesar 1,069,603,760,039.00 dengan mem-

berikan rata-rata kontribusi sebesar 785.953.893.908.6750%. Kontribusi minimum yang diberikan oleh LNBBN-KB adalah sebesar 451,954,606,714.50 dan kontribusi maksimumnya sebesar 984,749,660,968.00 dengan memberikan nilai rata-rata kontribusi sebesar 695.960.782.867.0480%. Kontribusi minimum yang diberikan oleh LNPAP adalah sebesar 10,845,979,912.00 dan kontribusi maksimumnya sebesar 513,205,513,586.00 dengan memberikan nilai rata-rata kontribusi sebesar 198.196.342.219.5720%. Kontribusi minimum yang diberikan oleh LNPBB-KB adalah sebesar 280,841,939,000.00 dan kontribusi maksimumnya sebesar 939,777,027,499.04 dengan memberikan nilai rata-rata kontribusi sebesar 606.949.699.347.6350%. Kontribusi minimum yang diberikan oleh LNPR adalah sebesar 316,092,178,944.00 dan kontribusi maksimumnya sebesar 3,866,149,015,117 dengan memberikan nilai rata-rata kontribusi sebesar 2.882.219.430.695.9000 %.

Analisis Regresi Berganda

**Tabel 3. Hasil Analisis Regersi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-1061.167	290.035		-3.659	.022
	LNPKB	24.281	20.603	2.033	1.179	.304
	LNBBN.KB	21.935	7.210	1.605	3.042	.038
	LNPAP	2.871	.967	1.276	2.968	.041
	LNPBB.KB	17.572	15.004	1.948	1.171	.307
	LNPR	8.640	6.259	.475	1.380	.240
Variabel terikat : Pendapatan Asli Daerah (Y)						
F = 9.124 dan sig 0,026 ; Adjusted R2 = 0,819						

Sumber: Output SPSS versi 25

Tabel 3 menyatakan kalau semua variabel independen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok memiliki arah koefisien regresi bertanda positif, Ada korelasi langsung antara semua variabel ini dan variabel dependen (pendapatan asli daerah). Perhitungan tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,026 untuk nilai F hitung sebesar 9,124. Jika kesalahan model kurang dari 0,05, itu bisa dilakukan. Akibatnya, R2 terkoreksi adalah 0,819 atau lima pajak daerah ialah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok menjadi variabel bebas, secara bersamaan bisa memberikan partisipasi sekitar 81.9% pada PAD menjadi variabel terikat, sementara selebihnya sekitar 18.1% dikarenakan oleh faktor-faktor di luar model. Dalam tabel 3 ada uji t sekitar:  $LNPAD = -1061,16 + 24.28LNPKB + 21.94LNBBN.KB + 2.87LNPAP + 17.57LNPBB.KB + 8.64LNPR$ , yang mana variabel Y yaitu LNPAD dan variabel X adalah jenis pajak daerah.

Nilai t-tabel buat taraf signifikansi 0,05 (5%) adalah 1,812, menurut data pengujian hipotesis. Untuk variabel LNPKB poin t hitung sekitar 1,179 lebih rendah dari poin t tabel sekitar 1,812, dan 0,304 lebih besar dari nilai Sig t sebesar 0,05, seperti terlihat pada Tabel 3. Hal ini menyebabkan ditolaknya H1 karena beberapa LNPKB berdampak negatif terhadap pendapatan asli daerah (Y). Karena itu, penerimaan fiskal daerah tidak akan naik akibat kenaikan pajak kendaraan bermotor. Seperti yang ditunjukkan oleh Widya (2020), pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang kecil terhadap PAD. Sebaliknya hasil penelitian Indriasari (2018), Fayrusz (2014) dan Debbyang, Darma, & Purnami, (2018) menyatakan pajak kendaraan bermotor berdampak signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan kalau pertumbuhan total kendaraan bermotor yang pesat di Sumsel tidak dibarengi dengan peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Sampai dengan tulisan ini dibuat, nilai t untuk Pajak Variabel Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (LNBBN.KB) diperkirakan sebesar 3.042, lebih tinggi dari angka pada T tabel (1.812), tetapi masih di bawah 0,05. ambang. Dengan demikian, hipotesis bahwa LNBBN.KB tertentu memiliki dampak menguntungkan yang lumayan tinggi pada PAD diterima. Hasil pengujian ini mendukung temuan Panggabean (2020) dan Rinika, D. (2019) dan bertentangan dengan pendapat Widya (2020), Savitri & Anggraeni (2021) dan Debbyang, Darma, & Purnami, (2018) yang menyatakan kecilnya jumlah yang membayar Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dibandingkan Pajak Kendaraan Bermotor menyebabkan tidak berdampak pada peningkatan PAD. Dari tabel 3 juga dapat kita ketahui, variabel Pajak Air Permukaan (LNPA) mempunyai t hitung sekitar 2.968, poin ini > poin t tabel ialah 1,812 dan poin Sig t sekitar 0,041 < 0,05. Alhasil H3 diterima, artinya Pajak Air Permukaan (LNPA) berpengaruh positif signifikan pada PAD. Tidak ada bukti bahwa pajak air permukaan berdampak pada PAD. Berbeda dengan temuan Widya (2020). Karena pentingnya hasil ini, Pemerintah Sumsel telah melakukan upaya bersama untuk memastikan bahwa aliran pendapatan yang dikategorikan sebagai objek pajak air permukaan dipantau secara ketat dan dioptimalkan oleh dinas pajak daerah.

Dari tabel 3 juga dapat kita ketahui, variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (LNBBB.KB) mempunyai t hitung sekitar 1.171, poin ini < poin t tabel ialah 1,812 dan poin Sig t sekitar 0.307 < 0,05. Penolakan H4 menunjukkan bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak berdampak besar pada PAD. PAD tidak terpengaruh pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut penelitian Widya (2020).

Dari tabel 3 juga dapat kita ketahui, variabel Pajak Rokok (LNPR) memiliki t hitung 1,380 < t tabel sekitar 1,82 dan poin signifikansi t > 0,05 yaitu sekitar 0,24. Pajak Rokok tidak berpengaruh pada pendapatan kota karena H5 terbukti salah. Perihal tersebut dikarenakan pajak rokok tidak sepenuhnya masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah, sebanyak 30% hasil dari pajak rokok diberikan kepada pemerintah pusat. Bagi Dolu, Natalia Florenca (2018), pajak cukai yang lebih besar menyebabkan kenaikan harga rokok, namun dalam penelitian ini administrasi dan efektivitas pajak rokok dianggap sangat diinginkan.

Rasio kontribusi mensinyalkan besar kecilnya jenis pajak daerah terhadap PAD. Berikut tampilan detail dengan rasio kontribusi pajak daerah tahun 2011 sebagai tahun dasar sebesar 5.52%.

**Tabel 4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan 2012-2021**

Tahun	Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Keterangan
2012	6.95%	Meningkat
2013	5.78%	Menurun
2014	8.46%	Meningkat
2015	6.65 %	Menurun
2016	7.29%	Meningkat
2017	8.67 %	Meningkat
2018	1.01 %	Menurun
2019	9.9 %	Meningkat
2020	1.18 %	Menurun
2021	1.35 %	Meningkat
Rata-rata	5.73%	

Sumber : Diolah, 2022

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD yang dilaksanakan oleh Pemda Prov Sumsel memperlihatkan kontribusi pajak daerah pada penerimaan PAD tertinggi dalam tahun 2019 sekitar 9,9% pada Tahun 2019, sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2018 sebesar 1.01%. Bagi pemerintahan dan pembangunan daerah Sumatera Selatan, pajak kota memegang peranan penting. Ada implikasi substansial untuk intensifikasi wajib pajak (pemutakhiran data wajib pajak saat ini) dan ekspansi (meningkatkan basis pendapatan wajib pajak baru atau memaksimalkan penyelidikan aliran pendapatan legal lainnya) bagi Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. Memastikan bahwa pejabat pajak setempat bertanggung jawab atas tindakan mereka, menegakkan denda hukum terhadap mereka yang melakukannya, dan mendidik warga tentang pentingnya mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku adalah semua prioritas.

## V. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil uji menunjukkan secara berurut Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok tidak berdampak signifikan pada PAD. Sedangkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan berdampak positif dan signifikan pada PAD. Kontribusi penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan PAD Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2012-2021 sebesar rata-rata 5.73% per tahun, angka ini menunjukkan target sudah tercapai, namun kontribusi dari penerimaan pajak secara keseluruhan masih belum optimal. Temuan ini berimplikasi bagi Pemerintah Daerah untuk dapat terus menggali potensi pajak sebagai sumber penerimaan PAD. Penting bagi Pemerintah Daerah untuk mengawal pelaksanaan pemungutan pajak, mempermudah administrasi perpajakan dengan melakukan pelayanan prima. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya terhadap penerimaan



pajak selain 5 variabel independen yang diuji, juga dengan menambah data per kabutpaten dan kota secara bulanan untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

## REFERENCES

- Afifah, R. A. N., & Nurdiwaty, D. (2020). Dampak Penerimaan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Dan Pendapatan Sah Lainnya Atas Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018). In *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* (Vol. 5, No. 1, Pp. 571-579).
- Anggraini, Margaretha, Anton Arisman, dan Christina Yunita. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonom/ Diakses tanggal 08 Februari 2017*.
- Debbyang, M. A., Darma, I. K., & Purnami, A. S. (2018). Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003–2017. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 1(2), 78-88.
- Dolu, Natalia Florenca. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Pada Kantor BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur). *library.unmer.ac.id*.
- Desi Indriasari, P. D. E. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan dan Bea Baliknama Terhadap pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(2), 132–140. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.3840838>
- Delima, P., Rismansyah, R., & Nurmala, N. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 248-262.
- Evi Aprianti, Riama. (2013). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Bandung.
- Halim, M., Husmaruddin, M. P., & Januse, N. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 1(1).
- Hasruddin, H. (2020). KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SINJAI (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Karyadi, M. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008–2017.: Penerimaan Pajak Daerah. *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 8(2), 180-192.

- Marita, N. M., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(1), 53-65.
- Rinika, D. (2019). "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Upt Medan Utara. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Savitri, N. G., & Anggraeni, A. Y. (2021). Analisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 3(1), 1-10.
- Suhayati, E. (2011). Pengaruh Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (Dppk) Kabupaten Bandung. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 3(2), 303-330
- Panggabean, F. Y. (2020). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Upt Medan Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(1), 140-155.
- Vamiagustina, V. (2014). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2).
- Widya, R. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb), Pajak Air Permukaan (Pap) Dan Sumbangan Pihak Ketiga (Sp3) Dealer Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada Uppd Marabahan. *Kindai*, 16(3), 516-522.